

PERAN GAPOKTAN DALAM USAHA AGRIBISNIS (Studi Kasus Prima Tani Sarolangun)

Adri

Peneliti BPTP Jambi, Jl. Samarinda Paal V Kotabaru, Jambi

Email : bptp_jambi@yahoo.com

ABSTRAK

Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia tanggal 11 Juni 2005 bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional dan menjaga kelestarian sumberdaya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Arah dari RPPK adalah mewujudkan pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Paling tidak ada tiga komponen dalam RPPK tersebut yaitu; teknologi, kelembagaan, dan kebijakan. Sejalan dengan itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No : 273/ KPTS /OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pertanian. Wilayah Prima Tani Kabupaten Sarolangun telah memiliki Gapoktan Sumber Rezeki yang merupakan gabungan dari 15 kelompok tani. Gapoktan Sumber Rezeki adalah salah satu dari 25 Gapoktan yang ada di Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 391 tahun 2007. Gapoktan Sumber Rezeki telah melakukan fungsinya dalam mendorong aktifnya kelompok tani yang selama ini tidak aktif dari 13,3% menjadi 26,7%, membantu memasarkan bibit karet unggul kepada konsumen sebanyak 50.000 batang, menyalurkan modal usaha kepada kelompok tani secara kredit sebesar Rp 35.000.000,-, dan menumbuhkan gairah berusahatani dan agribisnis serta terbukanya lapangan pekerjaan di pedesaan.

Kata Kunci : Gapoktan, Usaha, Agribisnis

PENDAHULUAN

Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia tanggal 11 Juni 2005 bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional dan menjaga kelestarian sumberdaya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Arah dari RPPK adalah mewujudkan pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Paling tidak ada tiga komponen dalam RPPK tersebut yaitu; teknologi, kelembagaan, dan kebijakan. Sejalan dengan itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No : 273/ KPTS /OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pertanian.

Badan Litbang Pertanian dan lembaga penelitian lainnya telah banyak menghasilkan paket teknologi dan dengan berbagai macam kebijakan pemerintah dalam penyuluhan seperti dikeluarkannya undang-undang penyuluhan No.16 Tahun 2006. Akan tetapi cukup banyak inovasi-inovasi teknologi dan kelembagaan yang tidak dapat diadopsi oleh petani karena berbagai alasan. Adnyana, (1995) mengatakan bahwa tidak diadopsinya inovasi teknologi dan kelembagaan oleh petani disebabkan oleh program yang diajukan kepada mereka hanya melihat kondisi yang dihadapi mereka secara parsial tanpa melihat lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani untuk menerima inovasi tersebut.

Memang tidak semua teknologi hasil penelitian dapat diadopsi oleh petani dan pengguna lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena selama proses penyampaian dan

pengembangan hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti partisipasi petani itu sendiri, kebijakan pemerintah, instansi terkait dan kualitas teknologi. (Manwan,1990). Sekurang-kurangnya ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh teknologi yaitu (1) secara teknis dapat diterapkan, (2) secara sosial budaya dapat diterima, dan (3) secara ekonomi menguntungkan (Partohardjono, *et al*, 1999)

Kehidupan sosial dalam masyarakat adalah dinamis, mengalami perubahan sesuai dengan perubahan waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga kegiatan menggerakkan petani baik secara perorangan maupun secara kelompok tani untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mengadopsi dan menggunakan inovasi teknologi bukan merupakan hal yang mudah, karena memerlukan bimbingan dan pendamping serta kehadiran pemimpin yang mereka segani dan hormati. Dengan demikian guna mempercepat adopsi teknologi oleh petani diperlukan pemimpin yang mampu memotivasi serta mendorong perubahan-perubahan dan peningkatan peranan anggota masyarakat dan kelembagaan pedesaan tempat mereka berusahatani

Peranan pemimpin yang dimaksud meliputi pemilik kekuasaan dalam kelembagaan formal dan non formal yang terdapat di wilayah pedesaan seperti kepala desa, tokoh agama dan adat, tokoh pemuda atau wanita, petani andalan yang telah berhasil dalam usahatani atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang juga akan dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat pedesaan.

Untuk itulah pemerintah selalu memperhatikan dan menumbuh kembangkan kelompok-kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No : 273/ KPTS /OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pertanian secara komprehensif dan sinergis.

Berdasarkan permasalahan dan kondisi usahatani yang pada umumnya memiliki produktivitas rendah dan kelembagaan kurang kondusif, yang mengakibatkan pendapatan dan kesejahteraan petani rendah, maka Departemen Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian melaksanakan Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (PRIMA TANI).

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk melihat sejauhmana peran dari kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sumber Rezeki yang terdapat dalam wilayah Prima Tani Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan adopsi teknologi serta menumbuhkan dan meningkatkan usaha agribisnis bibit karet unggul.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan kelembagaan Gapoktan Sumber Rezeki adalah pendekatan partisipatif. Pengurus Gapoktan merupakan perwakilan dari 15 kelompok tani yang ada berperan aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Tim Prima Tani berperan sebagai pendamping dan membantu dalam pembuatan program, kegiatan serta memberikan dukungan teknologi sepenuhnya.

Data dan informasi yang dikumpulkan adalah data kualitatif dan kuantitatif yang berhubungan dengan kelembagaan Gapoktan dan hasil usaha pembibitan karet unggul dari masing-masing kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Gapoktan dibutuhkan untuk menghantarkan inovasi

teknologi dalam peningkatan produksi dan pendapatan petani secara maksimal dan berkelanjutan (Drajat dan Syukur, 2006)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Kelembagaan Gapoktan dalam Adopsi Teknologi

Kelembagaan mengandung dua pengertian yang disebut institusi atau pranata dan organisasi. Pengertian kelembagaan sebagai organisasi lebih mudah dikenali dalam bentuk nyata seperti KUD, Bank, Pemerintahan dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian kelembagaan sebagai pranata dapat dikenali melalui pemahaman unsur-unsurnya. Kelembagaan dalam arti institusi mengandung empat unsur pokok yaitu adanya aturan main (*rule of the game*), pengaturan hak dan kewajiban (*property right*), batas yurisdiksi atau ikatan serta adanya sangsi. (Anwar, 1990, dan Soentoro, 2000).

Menurut Hayami (1977) kelembagaan muncul atau berubah dipengaruhi oleh adanya kelangkaan sumberdaya tertentu. Adanya kelangkaan sumberdaya tersebutlah, maka masyarakat membutuhkan pranata untuk mengatur penggunaannya. Disamping itu pilihan terhadap kelembagaan yang dianut dipengaruhi oleh resiko yang mungkin diterima oleh masing-masing pelaku dalam kelembagaan tersebut.

Sedangkan pengertian Gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang mempunyai beberapa kesamaan objek perhatian, berintegrasi secara mantap, menyusun suatu struktur dan bersama pula dalam berpartisipasi terhadap suatu kegiatan. Dengan demikian Gapoktan merupakan himpunan orang-orang yang terdapat dalam kelompok tani yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan diantara mereka yang menyangkut kaitan timbal balik yang saling membutuhkan dan kesadaran untuk saling menolong dalam tatanan kehidupan sosial ekonomi.

Adopsi teknologi adalah sejauh mana suatu teknologi introduksi digunakan oleh petani atau pengguna lainnya. Menurut Rogers dan Shoemaker, (1971), pengertian adopsi adalah proses mental sejak individu mengetahui adanya inovasi sampai mengambil suatu keputusan untuk menerima atau menolak inovasi atau pembaharuan tersebut. Keberhasilan dalam proses adoptasi teknologi ditentukan oleh 3 faktor ; (1). keuntungan relatif suatu inovasi, (2) kecocokan inovasi dengan norma kebudayaan setempat, lingkungan fisik yang ada, dan (3) kondisi ekonomi petani, tersedianya penunjang inovasi serta konsekuensi jika inovasi diterima. (Partohardjono, *et al*, 1999 dan Fliegel *et al*, 1971).

Tabel 1. Adopsi teknologi pembibitan karet unggul

Komponen Taknologi	Adopsi (%)	Keterangan
Penggunaan biji batang bawah	75	Biji batang bawah yang direkomendasikan GT 1, PR 300, PR 228, AVROS 2037, PB 260 dan LCB 1320.
Teknik Pengecambahan dan	75	
Penanaman	70	
Pemupukan	80	
Okulasi	80	

Data sekunder dari Kelompok Tani Penangkar Bibit Tunas Subur, 2007

Biji untuk batang bawah yang paling banyak digunakan oleh petani adalah jenis GT 1, hal ini disebabkan karena kulit batang jenis GT 1 lebih tebal dan memudahkan bagi petani dalam melakukan okulasi serta tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan dengan jenis batang bawah lainnya. Sebagian petani masih ada yang menggunakan biji batang bawah yang tidak diketahui secara jelas asalnya (label merah). Pemerintah sangat memperhatikan mutu dari bibit, sehingga untuk tahun 2008

pemerintah merekomendasikan penggunaan bibit unggul berlabel biru (sumber entres dan batang bawah diketahui). Dewasa ini sumber biji yang dapat dijadikan sebagai batang bawah kebanyakan berasal dari Balai Penelitian Karet Sembawa, Sumatera Selatan dan Pusat Penelitian Karet Sungai Putih, Sumatera Selatan. Hendaknya Pemerintah provinsi Jambi melalui instansi terkait dapat melakukan survei dan menetapkan daerah-daerah yang dapat dijadikan sumber biji batang bawah, sehingga dapat membantu petani dalam penyediaan biji batang bawah.

Adopsi terhadap komponen teknologi lainnya seperti teknik pengecambahan, penanaman, pemeliharaan terutama pemupukan masih rendah hal ini disebabkan oleh adanya pola pikir petani yang sudah tertanam selama ini dalam kehidupan mereka. Hal ini terlihat dari rekomendasi jarak tanam batang bawah 30 x 30 cm tidak mereka lakukan sepenuhnya karena petani berpikir terlalu sedikit hasilnya persatuan luas tanah yang mereka miliki. Rendahnya adopsi teknologi pemupukan juga disebabkan oleh sulitnya ketersediaan pupuk dalam jumlah dan waktu yang dibutuhkan petani serta tingginya harga pupuk. Pemerintah perlu mengkaji ulang mekanisme dan prosedur penyaluran pupuk sehingga tidak terjadi lagi kelangkaan pupuk saat petani membutuhkan.

Komponen teknologi okulasi terlihat sudah dikuasai oleh petani, hal ini disebabkan oleh adanya petani pendatang dari daerah lain (Lampung dan Sumsel) yang mempunyai keahlian okulasi dan mengembangkannya kepada petani lain. Disamping itu, di daerah ini juga telah ada penelitian dan binaan yang intensif oleh Balai Penelitian Karet Sembawa.

Proses adoptasi teknologi terjadi –pada masing masing individu tidaklah sama karena individu tersebut tidaklah selalu mempunyai kesempatan, ketekunan, dan keuletan dan kebutuhan yang sama dalam menerima inovasi. Gunawan, (1995) menambahkan bahwa adopsi teknologi bisa berlangsung lambat atau cepat tergantung antara lain kepada kompleksitas teknologi, kemampuan partisipan untuk mengadopsi (pengetahuan, keuangan), masalah yang berkaitan dengan kultur budaya, informasi dan tingkat resiko yang harus ditanggung oleh pelaksanaannya. Kelompok Tani dalam mengadopsi teknologi dapat berperan sebagai mitra pemerintah, motor penggerak pembangunan pertanian wadah diskusi serta penentu keberhasilan pembangunan pertanian.

Mitra Pengembangan dan Usaha

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat berkepentingan dengan keberadaan Kelompok Tani, karena adanya Kelompok Tani sangat mendukung program program pengembangan berbagai macam komoditas andalan, disamping itu kelompok tani berfungsi pula sebagai mediator keberhasilan penyuluhan, karena kelompok tani dengan sendirinya akan menyebarluaskan (penyuluh swakarsa) program pengembangan kepada anggota – anggotanya khususnya dan masyarakat luas umumnya..

Dalam masyarakat pedesaan banyak terdapat berbagai perbedaan (*heterogenitas*) dari berbagai aspek kehidupan. Perbedaan tersebut dilihat dari unsur-unsur tingkat pendidikan, pengalaman, wawasan ataupun ilmu pengetahuan yang ada pada masing masing petani, sehingga menyebabkan kendala tersendiri untuk mempercepat proses adoptasi teknologi kepada petani tersebut. Sikap pandang, penerimaan dan daya serap terhadap suatu inovasi baru dibidang teknologi. Dengan adanya perbedaan tersebut diperlukan kelembagaan yang bisa menjadi mediator dan wadah dalam mengadopsi teknologi yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian lainnya.

Kelembagaan informal dipedesaan seperti Kelompok Tani, Gapoktan, dan kelembagaan lainnya yang kondusif akan berperan sebagai Mitra Pemerintah. Pendekatan terhadap kelembagaan informal di pedesaan tersebut dilakukan dengan pola kemitraan yang saling menguntungkan. Keberhasilan kemitraan petani mengadopsi teknologi ditentukan harmonisnya hubungan diantara semua pihak yang berkepentingan.

Sikap budaya masyarakat petani dipedesaan yang pada dasarnya masih peternalistik yang menghormati dan mengikuti para sesepuh dan pemimpin desa serta tokoh tokoh informal lainnya. Sifat budaya ini merupakan potensi yang dapat dipakai dalam melakukan pendekatan untuk mensosialisasikan inovasi teknologi dan program pemerintah dalam peningkatan dan pengembangan usaha pertanian. Prasadja, (1987) melihat bahwa kepemimpinan seseorang didasarkan pada kekuasaan formal, kepercayaan dan kekayaan. Namun, untuk pemimpin informal seperti halnya pemimpin tradisional atau pemimpin adat maka kepercayaan dan kekayaanlah yang paling utama sedangkan kekuasaan legal tidak harus ada.

Table 2. Kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Sumber Rezeki

No.	Kelompok Tani	Kepengurusan			Jml Angg.	Kls Klp	Thn Berdiri
		Ketua	Sekretaris	Bendahara			
1.	Sumber Rejeki II	Suparmin	Badrun	Bandri	27	L	1982
2.	Sumber Rejo	Sutrisno	Kanang	Darjo	26	P	1982
3.	Sumber Jaya	Karyo	Giyanto	Warno	24	P	1982
4.	Margo Santoso	Untung	Mitro	Yanto	28	L	1982
5.	Satu Hati	Kimun	Ridwan	Pujo	27	P	1982
6.	Sumber rejeki I	Subari	Sukir	Marjo	35	M	1982
7.	Margo Mulyo II	Minadi	Seni	Bejan	27	P	1982
8.	Sido Makmur	Winoto	Tirto	Rais	28	P	1982
9.	Margo Mulyo I	Siman JS	Muji	Seni	26	P	1982
10.	Cinta Makmur I	Rohmat	Marto	Mingan	28	P	1982
11.	Cinta Makmur II	Sugianto	Yitno	Hamdan	25	M	1982
12.	Sumber Mulyo	Muryadi	Hartono	Komar	22	P	1982
13.	Jati Mulyo	Sugeng	Hendra	Herman	24	P	1982
14.	Margo Dadi	S.Warni	S.Pardi	S.Kardi	20	L	1982
15.	Tunas Subur	Rojak.S	Hardiono		29	-	2007

Sumber : BPP Pelawan Singkut (2006)

Keterangan : L = Lanjut, P = Pemula, M = Madya

Analisis Agribisnis Sub-Sistem Hulu (*up-stream*)

Pembangunan pertanian kita dimasa lalu berjalan secara parsial dari satu sub.sistem dengan sub.sistem lainnya. Dengan kata lain bahwa pembangunan pertanian tidak disertai dengan pengembangan industri hulu- hilir pertanian serta jasa-jasa pendukung secara harmonis dan simultan, sehingga kinerjanya tidak mampu mendayagunakan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Akibat dari semua itu nilai tambah yang diraih oleh petani terlalu kecil bahkan nyaris tidak ada sehingga tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tetap rendah.

Penyediaan bibit unggul dan penyediaan sarana produksi pupuk dan obat-obatan merupakan kegiatan subsistem hulu yang harus dipenuhi dalam sistem agribisnis. Di Desa Sungai Merah sudah ada industri yang menghasilkan bibit unggul, tetapi masih bersifat konvensional artinya belum terkontrolnya kuantitas dan kualitas bibit yang

dihasilkan. Selama ini masing-masing petani memproduksi bibit dalam jumlah sedikit dan tidak mempunyai kebun entres yang baik. Langkah untuk mencapai kuantitas dan kualitas yang baik adalah metode aglomerasi para petani penghasil bibit yang berada dibawah suatu kelompok penangkar yang mempunyai Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) bibit karet, Dengan demikian jaminan mutu bibit dan pemasaran akan lebih terjamin dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sejak adanya Prima Tani awal tahun 2007 di Desa Sungai Merah sub.sistem hulu (penyediaan bibit) unggul telah mulai dibenahi dan merupakan titik ungit ekonomi masyarakat. Pembenahan dilakukan mulai dari teknik budidaya pembibitan, penggunaan bahan tanaman baik untuk batang bawah maupun batang atas sesuai dengan rekomendasi Badan Litbang Pertanian. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan teknologi pembibitan (Tabel 1) telah memberikan nilai tambah kepada petani (Tabel 2).

Selama tahun 2007 anggota Kelompok Tani yang tergabung kedalam Gapoktan telah dapat menghasilkan bibit unggul karet sebanyak 64.000 batang bibit polibag. Bibit tersebut dipasarkan oleh Gapoktan (unit pemasaran) kepada pihak-pihak pembeli dengan harga berkisar Rp 2.500,- hingga Rp 3.000,- per polibag.

Dengan demikian Gapoktan Sumber Rezeki telah berhasil memainkan perannya dalam agribisnis bibit unggul karet. Secara keseluruhan uang yang mengalir kepada petani penghasil bibit adalah sebesar Rp 172.500.000,- selama tahun 2007.

Tabel 3. Kinerja gapoktan dalam agribisnis bibit unggul karet

Tahun.	Kegiatan	Jumlah (btg)	Buyer	Nilai (Rp)
2007	Penyaluran bibit	39.000	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	97.500.000,- (@ 2.500,-)
2007	Penyaluran bibit	25.000	Petani dan pembeli lainnya	75.000.000,- (@ 3.000,-)
2008	Pengadaan bibit	200.000	Pemerintah Provinsi Jambi	Belum ada kesepakatan harga

Sumber : Gapoktan dan Kelompok Tani Penangkar Tunas Subur (2007)

Harga jual bibit di Sarolangun khususnya dan Provinsi Jambi umumnya masih berfluktuasi dan belum adanya standar harga yang bisa dijadikan pedoman oleh petani. Petani cenderung menerima harga lebih murah dibandingkan harga yang sebenarnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan harga bibit unggul karet diupayakan melalui peningkatan kualitas bibit dari label merah ke label biru serta melakukan pemasaran secara berkelompok untuk meningkatkan posisi tawar petani.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari peran Gapoktan terhadap peningkatan usaha agribisnis dan pembangunan pertanian adalah :

1. Gapoktan sebagai motor penggerak dan mitra pemerintah dan pelaku bisnis lainnya
2. Nilai tambah produk pertanian dapat diraih melalui adopsi inovasi teknologi dan kelembagaan.
3. Usaha agribisnis meningkatkan pendapatan petani, jumlah uang yang beredar di masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan investasi dan tabungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Affendi. 1990. Peranan Kelembagaan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lokal. Program Pasca sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Departemen Pertanian. 2006. Pedoman Umum Prima Tani. Departemen Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, September 2006.
- Drajat, B., dan Mat Syukur. 2006. Petunjuk Teknis Kelembagaan. Apresiasi Manajemen dan Konsep Prima Tani Untuk Manajer Laboratorium Agribisnis. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Hayami Y. dan K. Masao. 1977. Dilema Ekonomi Pedesaan. Suatu pendekatan terhadap perubahan kelembagaan di Asia. Yayasan Obor, Indonesia Jakarta.
- Manwan, I. 1990. Penelitian Pengembangan Tanaman Pangan .Rapat Kerja Badan Litbang Pertanian.
- Partohardjono, Soetjipto., A.K. Makarim., M.Hasanah., dan A.Setyono. 1999. Metodologi Penelitian dan Pengkajian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Prasadja Budi. 1987. Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinan. Grafiti Prersss. Jakarta.
- Soekanto dan Soerjono. 1982. Sosiologi suatu pengantar. PT. Rajawali Jakarta.
- Soentoro. 2000. Rekayasa dan Pengembangan Kelembagaan Penunjang. Keberlanjutan Adopsi Teknologi Usahatani di lahan Rawa.